

BAB II

SENGKETA PERBATASAN ANTARA TIONGKOK DAN INDIA DI WILAYAH HIMALAYA

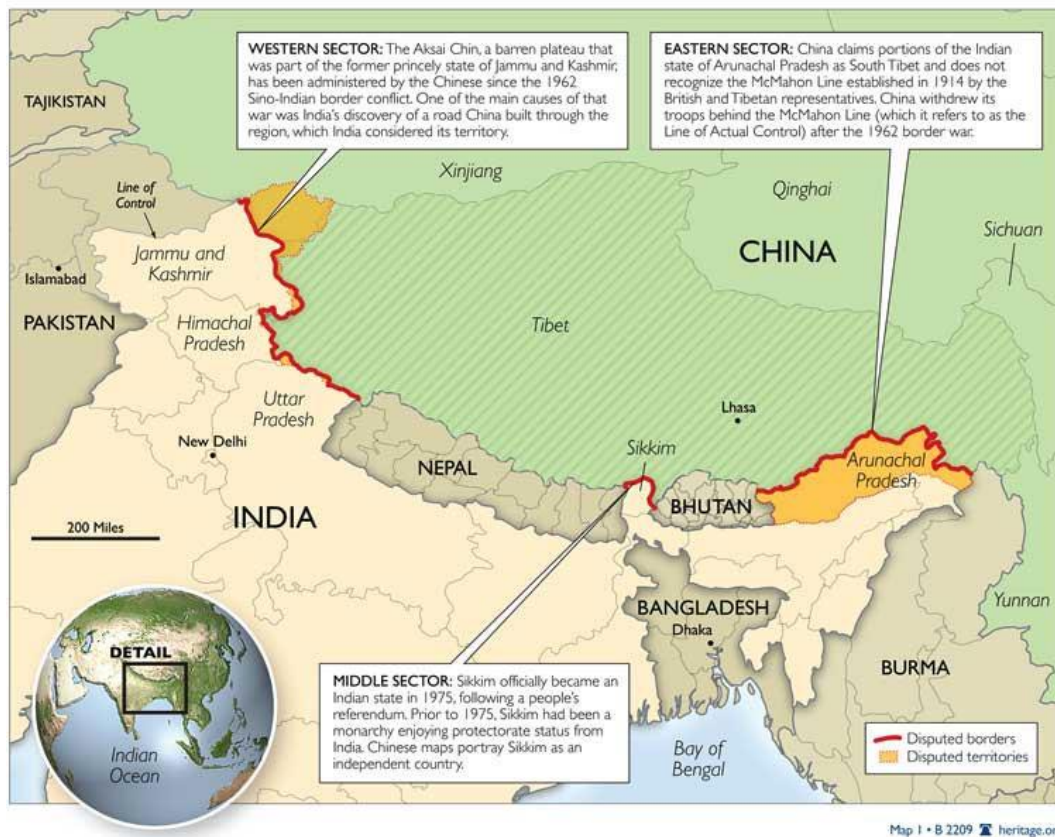
Hubungan diplomatik antara India dan Tiongkok yang terbangun sejak 31 Desember 1949 telah melahirkan berbagai bentuk kerjasama maupun agresi. Hubungan bilateral keduanya juga didorong dengan potensi ekonomi yang besar dan kepentingan nasional yang dibawanya. Namun kedua negara menghadapi tantangan besar yang belum terselesaikan yakni sengketa perbatasan. Wilayah perbatasan diperdebatkan pasca ekspansi Inggris dan Rusia ke wilayah tersebut dan menempatkan Tibet sebagai *buffer zone*. Aksi klaim garis perbatasan yang dimulai sejak tahun 1954 dan memuncak pada perang tahun 1962 antara India dan Tiongkok. Saat ini hubungan bilateral lebih mengarah ke arah kerjasama pragmatis dengan stagnansi pada perkembangan hubungan dan defisit kepercayaan (Muratbekova, 2017, pp. 1-2).

Permasalahan sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India semakin beku dan sulit untuk terselesaikan. Tiongkok sudah menyelesaikan sengketa perbatasan di wilayah McMahon Line dengan Myanmar namun tidak dengan India. Tiongkok telah menyelesaikan hampir seluruh masalah perbatasan termasuk dengan negara adidaya Rusia pada tahun 2015. Proses negosiasi sudah berlangsung 64 tahun sejak tahun 1954 dan memuncak dengan peristiwa Dooklam Standoff pada tahun 2017. Garis sengketa perbatasan yang luas dan kompleks di wilayah Himalaya menjadi salah satu sebab sulitnya mengontrol proses resolusi sengketa perbatasan (Thapliyal, 2010, pp. 203-204).

2.1 Wilayah Sengketa Perbatasan

Tiongkok maupun India mempunyai versi sendiri dalam menentukan garis perbatasan di wilayah sengketa. Hal ini bermula ketika Inggris dan Rusia tidak memberikan delimitasi ataupun demarkasi garis batas wilayah pasca ekspansi. Dampaknya masing-masing negara mempunyai kesempatan untuk memaksakan definisi garis perbatasan. Secara umum terbagi menjadi 3 wilayah besar yakni Sektor Timur, Sektor Tengah dan Sektor Barat (Shrivastava, 2016, p. 2).

Gambar 2.1 Wilayah Sengketa Perbatasan India, China Disputed Borders



Sumber: <https://www.scmp.com/news/china/article/1239192/border-dispute-obstacle-building-trust-between-china-and-india>

2.1.1 Sektor Timur

Gambar 2.2 Sektor Timur



Sumber: <http://www.theshillongtimes.com/2017/05/03/new-arunachal-assembly-building-ready/>

Sektor Timur menjadi perhatian lebih dalam usaha penyelesaian sengketa antar kedua negara. Hal ini karena wilayah Arunachal Pradesh (pusat sengketa sektor timur) mempunyai pengaruh besar terhadap Dalai Lama Tibet (Kepala Budha Tibet) yang menjadi area *buffer zone*. Tiongkok menganggap bahwa India merusak hubungan bilateral dengan memberi izin Dalai Lama masuk ke wilayah Arunachal Pradesh. Ketidakkonsistenan India atas kesepakatan yang dibangun di sektor timur akan berpengaruh pada sikap Tiongkok di kawasan Sikkim (sektor tengah) dan Aksai Chin (sektor barat) (Aneja, 2017).

Wilayah yang disengketakan di sektor timur dari Sikkim hingga perbatasan dengan Myanmar dengan Arunachal Pradesh sebagai wilayah terbesarnya. Secara detail terdapat 5 titik utama wilayah di Arunachal Pradesh yang menjadi sengketa. Pertama Asaphila, daerah pegunungan yang terletak di sepanjang Line of Actual Control (LAC) di Upper Subansiri Division. Kedua, Longju, terletak di Upper Subansiri Division yang berseberangan langsung dengan pos militer tentara China di Migyitun, Tibet. Ketiga kawasan sungai Namka Chu, terletak di lembah Tawang District. Keempat Sumdorong Chu, merupakan kawasan anak sungai Namka Chu di Kya

Pho, Tawang District. Kelima Yangtse, kawasan yang berseberangan dengan Sumdorong Chu (Gurung, 2018).

Salah satu bagian terpenting dari sengketa perbatasan di Sektor Timur adalah McMahon Line. Garis batas ini pertama kali dibuat untuk memberi batas antara Tibet dan India di Sektor Timur. Ide ini digagas pada 3 Juli 1914 dalam Perjanjian Shimla oleh seorang tentara imperial British India Lieutenant Colonel Sir Arthur Henry McMahon. Namun Tiongkok menolak perjanjian ini karena keterlibatan Tibet didalamnya. Tiongkok menganggap bahwa Tibet dibawah kedaulatan Tiongkok sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan perjanjian internasional (Rose, 1968, pp. 132-133). Garis perbatasan ini terbentang sejauh 890 km dari Bhutan di Sektor Barat ke 260 km Sektor Timur dari Brahmaputra dan terbentang sepanjang puncak Himalaya. McMahon Line tidak hanya sebagai garis perbatasan antara Tiongkok dan India namun juga sebagai aksi klaim Tibet sebagai satu keseluruhan di bawah kedaulatan Tiongkok (Kalha R. S., 2014).

2.1.2 Sektor Tengah

Sektor Tengah menjadi area pertama munculnya konflik perbatasan antar kedua negara. Wilayah Barahoti merupakan wilayah yang pertama kali di klaim oleh Tiongkok pada tahun 1954. Aksi klaim ini kemudian memunculkan reaksi dan protes dari India yang menyebabkan perselisihan di kawasan perbatasan hingga saat ini. Area perbatasan terbentang sejauh 625 km dari Ladakh hingga Nepal melewati kawasan Himachal Pradesh dan Uttarakhand. Garis perbatasan terbentang di kawasan puncak Himalaya kecuali area Shipki La di Himachal Pradesh dan Jadhang & Bora Hoti di Uttarakhand yang ditarik ke wilayah Tiongkok sebagai aksi klaim (Shrivastava, 2016, p. 4).

Gambar 2.3 Sektor Tengah



Sumber: <http://new.resurgentindia.org/the-history-of-sino-indian-relations-and-the-border-dispute-between-the-two-countries-3/>

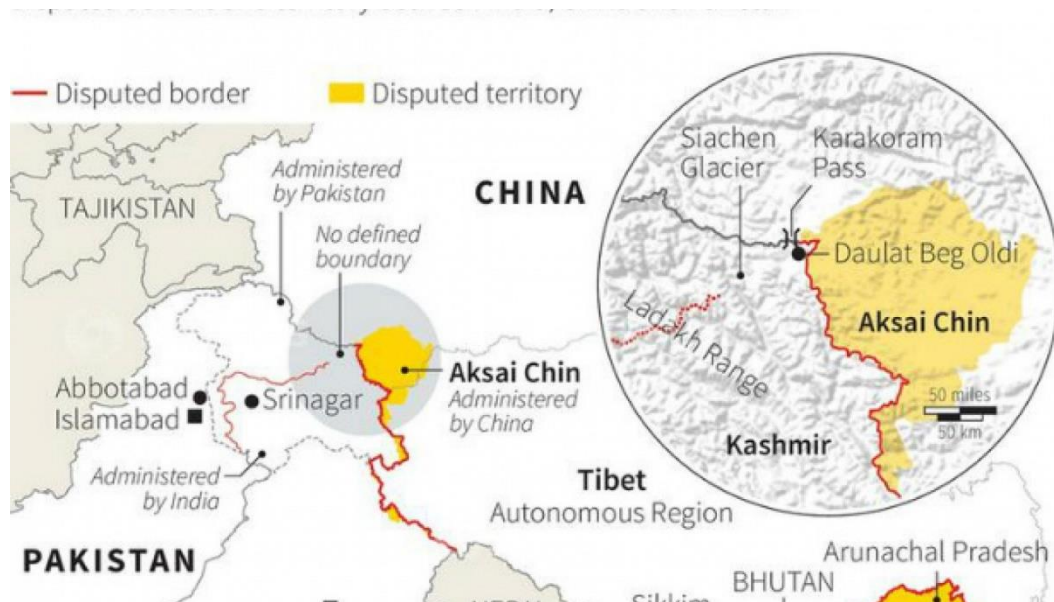
2.1.3 Sektor Barat

Sektor Barat menjadi wilayah kedua terbesar yang disengketakan antara Tiongkok dan India. Wilayah yang disengketakan mencapai 2152 km dari Jammu & Kashmir hingga Provinsi Xinjiang. Garis perbatasan melewati kawasan Muztagh Ata Range dan Gunung Aghil melintasi Karakoram Pass via Quara Tagh Pass serta Kunlun Range. Perbatasan ini digagas pada perjanjian Ladakh-Tibet pada tahun 1665 dan 1686 dan dikonfirmasi pada perjanjian Dogra-Ladakh 1842 oleh Kashmir, Tibet dan Tiongkok (Shrivastava, 2016, p. 3).

Area konflik sektor barat terpusat di Aksai Chin yang mengakibatkan peperangan pada tahun 1962. Aksai Chin menjadi area yang diperebutkan karena demarkasi yang tidak jelas warisan imperialisme Inggris. Terdapat dua garis perbatasan yang diusulkan oleh Inggris yakni Johnson's Line dan McDonald Line. Johnson's Line (sepanjang pegunungan Kunlun) dideklarasikan pada tahun 1865 dan sebagai dasar klaim India. Sementara McDonald Line (dari Hunza ke Xinjian melewati

puncak Karakoram) di deklarasi pada tahun 1893 dan sebagai dasar klaim Tiongkok. Dasar klaim India atas Aksai Chin adalah sejarah administrasi pemerintahan Jammu dan Kashmir sejak tahun 1849. Garis perbatasan tersebut dikonfirmasi pada perjanjian India-Tibet tahun 1665, 1684 dan 1842. Sementara Tiongkok mengklaim Aksai Chin berdasar pada hubungan budaya antara Tibet dan Aksai Chin. Aksai Chin mempunyai kesamaan bahasa, agama dan budaya dengan Tibet (salah satu wilayah kedaulatan China) (Aarten, 1986, p. 2).

Gambar 2.4 Sektor Barat



Sumber: <http://www.examsprint.com/article/s/india-china-border-disputes>

2.2. Dinamika Negosiasi China-India atas Kasus Sengketa Perbatasan Periode 1954 – 2004

2.2.1. Panchsheel Agreement

Pada 29 April 1954, Tiongkok dan India telah membuat 5 prinsip dasar hubungan bilateral yang disebut Panchsheel (5 prinsip damai). Kemudian prinsip ini diadopsi dan mendapat suara penuh pada 11 Desember 1957 oleh Majelis Umum PBB. Prinsip ini dibentuk untuk menanggapi aspirasi dari dunia internasional bahwa hubungan antar negara harus kooperatif dan berjalan damai. Panchsheel dideklarasikan pada pertemuan Perjanjian Dagang dan Hubungan Tibet (regional Tiongkok) dan India (*Agreement on Trade and Intercourse between the Tibet region of China and India*). Gopal selaku penulis resmi biografi Nehru menyebut prinsip ini sebagai *zenith of world influence* (Arpi, 2015).

Lima prinsip dasar tersebut :

- i. *Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty,*
- ii. *Mutual non-aggression,*
- iii. *Mutual non-interference,*
- iv. *Equality and mutual benefit, and*
- v. *Peaceful co-existence* (Panchsheel, 2004, p. 1).

Prinsip dasar ini menyatukan dari *Ten Principles of International Peace and Cooperation* yang dideklarasikan dalam Konferensi Asia Afrika ke 29 pada April 1955. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru menggagas sebuah Joint Statement pada 28 Juni 1954 yang dielaborasi dengan Panchsheel untuk membentuk sebuah *framework* bahwa prinsip ini tidak hanya digunakan antara dua negara namun untuk seluruh negara. Panchsheel juga dibentuk untuk membantu dunia internasional menghindari konsep tradisional seperti *balance of power* dan *competitive security*. Prinsip ini memberi pedoman bagi seluruh negara untuk berinteraksi dengan damai dan kooperatif sekaligus tetap menjaga identitas, semangat dan karakter bangsa (Nn, Panchsheel, 2004, pp. 2-4).

Satu tahun pasca penandatanganan perjanjian Panchsheel, pada 1 April 1955 Tiongkok dan India menandatangani Protokol di Lhasa. Protokol tersebut berisi kesediaan India untuk menyerahkan kontrol atas Tibet ke Tiongkok dan mengakuinya sebagai bagian dari kedaulatan negara tersebut. Jawaharlal Nehru mengganti hak-hak ekstrateritorial warisan imperial Inggris di Tibet dengan menarik pengawalan militernya dari Tibet serta menyerahkan layanan pos, telegraf dan telepon kepada Tiongkok. Terbentuknya protokol juga menjadi awal mula terjadinya klaim Tiongkok di wilayah perbatasan. Tiongkok mengklaim wilayah India atas dasar keterkaitannya dengan Tibet seperti Arunachal Pradesh dengan budaya dan bahasa (Chellaney, *Why Tibet Remains the Core Issue in China-India Relations*, 2014).

Zhou Enlai dan Jawaharlal Nehru mengadakan pertemuan pada 19 April 1960 guna menanggapi aksi klaim yang terjadi sejak tahun 1955. Pertemuan ini penting guna menanggapi pelanggaran Tiongkok terhadap Perjanjian Panchsheel (Hyer, 2017). Pada 23 Januari 1959, Zhou Enlai mengumumkan klaimnya atas 40.000 mil persegi wilayah territorial India yakni Ladakh dan North East Frontier Agency (NEFA) atau Arunachal Pradesh. Selanjutnya 8 September 1959 China menolak secara tegas garis perbatasan McMahon Line dengan tidak ikut menandatangani Perjanjian Damai 1842 antara British India dan Inggris. China kemudian juga melakukan klaim 50.000 mil persegi atas Sikkim dan Bhutan (Maxwell, *Sino-Indian Border Dispute Reconsidered*, 1999, pp. 906-907).

2.2.2. Perjanjian antara Tiongkok dan Pakistan tentang Penyelesaian Sengketa Perbatasan

Tiongkok dan Pakistan melakukan penandatanganan kesepakatan penyelesaian sengketa pada 3 Maret 1963. Kesepakatan terjadi pasca perang besar antara militer Tiongkok dan India di sepanjang garis perbatasan dari sektor timur ke barat pada tahun 1962. Kesepakatan ini bersifat timbal balik, Tiongkok memberikan lebih dari 100 mil tanah teritorialnya ke Pakistan dan

sebaliknya Pakistan mengakui kedaulatan Tiongkok atas ratusan kilometer persegi tanah di utara Kashmir dan Ladakh. *Win-win solution* menjadi tujuan kedua negara membentuk kesepakatan ini, Pakistan mendapatkan area yang luas tanpa konflik dan Tiongkok memperkuat posisinya di area perbatasan dengan India. Pakistan menyerahkan kontrol atas sengketa perbatasan Kashmir dengan India kepada Tiongkok (Afridi & Khan, 2016, pp. 2-3).

2.2.3 Revitalisasi Hubungan Bilateral Pasca 15 tahun Kekosongan Diplomatik (1960-1975)

Pertemuan Zhou Enlai dan Jawaharlal Nehru pada tahun 1960 menjadi hubungan diplomatik terakhir sebelum perang 1962 terjadi. Situasi tidak terkendali pasca penolakan Tiongkok terhadap tawaran India untuk membahas masalah klaimnya atas Bhutan dan Sikkim tahun 1961. Peperangan besar terjadi pada tahun 1962, tentara Tiongkok masuk ke wilayah Sikkim Utara dan NEFA lagi dan kemarahan Tiongkok atas bergabungnya Sikkim ke Indian Union (Nn, 1975). Sikkim melakukan referendum dan hasil pemungutan suara menyatakan keputusan untuk bergabung dengan India. Namun Tiongkok menuduh keputusan tersebut atas dasar paksaan India dengan menyandra Chogyal (pemimpin) mereka yakni Palden Thondup Namgyal (Ray, 1984, pp. 2-7).

Pada April 1976, Tiongkok dan India memutuskan untuk merevitalisasi hubungan diplomatik yang sempat kosong selama 15 tahun. Sebagai tanda bukti kedua negara secara simbolis mengirimkan duta besar untuk datang ke masing-masing negara. K. R Narayanan sebagai duta besar perwakilan dari India ke Tiongkok dan Chen Chao Yuan sebagai duta besar perwakilan Tiongkok ke India. Keputusan ini dipertergas dengan kunjungan Menteri Luar Negeri India Atal Bihari Vajpaye ke Tiongkok pada Februari 1979, pertama kalinya setelah kunjungan Zhou Enlai ke India pada tahun 1960. Selama kunjungan, kedua negara aktif membahas tentang permasalahan perbatasan termasuk pengajuan gagasan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Huang Hua. Gagasan

tersebut berisi tiga formula yakni: (Singh Z. D., *The Himalayan Stalemate Retracing the India-China Dispute*, 2011, pp. 12-14)

1. Menyadari pentingnya penyelesaian lebih dini pada masalah perbatasan oleh kedua belah pihak
2. Memastikan terwujudnya perdamaian dan ketenangan di daerah perbatasan selama proses negosiasi berlangsung
3. Menghindari hal yang akan menjadi hambatan dalam pengembangan hubungan bilateral di berbagai bidang

2.2.4 Perjanjian Pembentukan Joint Working Group untuk membahas Masalah Perbatasan

India menerapkan diplomasi aktif dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan dengan pembentukan perjanjian maupun kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Pada 23 Desember 1988, Perdana Menteri Rajiv Gandhi beserta para menterinya melakukan kunjungan guna penandatanganan perjanjian dan pembentukan *Joint Working Group*. Terdapat dua perjanjian yang ditandatangani oleh kedua negara yakni Perjanjian Pengelolaan Transportasi Sipil Udara dan Perjanjian Kerjasama Budaya (Nn, 2014, pp. 53-55).

Joint Working Group dibentuk untuk menciptakan kondisi damai selama proses pencarian solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Agenda ini menjadi perbaikan dari perjanjian Panchsheel untuk menghindari kesalahan hingga mengakibatkan perang tahun 1962. Perjanjian Panchsheel menetapkan prinsip dasar tanpa adanya proses penyelesaian sengketa yang kooperatif dan berasas kerjasama sehingga mengakibatkan perbedaan cara pandang. Sebagai bukti, pada tahun 1986 kedua negara mengumumkan garis perbatasan dengan versi yang berbeda atas McMahon Line dan wilayah Arunachal Pradesh (Nn, 1989, pp. 199-200).

Joint Working Group (JWG) diadakan 15 pertemuan mulai dari tahun 1989-2005 dengan tuan rumah Beijing dan New Delhi dengan beberapa fase pembahasan dan perkembangan proses negosiasi sebagai berikut : (Deepak, 2005, pp. 303-325)

Tabel 2.1 Joint Working Group

No	Joint Working Group (JWG)	Pembahasan
1	1-4 Juli 1989 di Beijing	Optimalisasi kerja ahli militer dalam menjaga perdamaian dan ketenangan selama proses negosiasi di sepanjang garis LAC
2	31 Agustus-1 September 1990 di New Delhi	Perumusan pertemuan regular antar personil militer sebagai upaya pertukaran informasi dan transparansi kegiatan militer di pos perbatasan
3	13 Mei 1991 di Beijing	Tidak ada pembahasan spesifik namun penegasan kembali kestabilan area selama proses negosiasi berlangsung
4	20-21 Februari 1992 di New Delhi	Evaluasi dan pembahasan tiga ronde JWG sebelumnya. Kesepakatan pembentukan pertemuan personil militer dan menteri pertahanan yang diadakan dua kali dalam setahun (Juni & Oktober). Bertempat di Bum La (Sektor Timur) & Spanggur Gap (Sektor Barat). Pengusulan jaringan telepon langsung antara komandan militer.
5	27-29 Oktober 1992 di Beijing	Evaluasi empat ronde JWG sebelumnya serta bertukar pandangan tentang masalah perbatasan
6	25-30 Juni 1993 di New Delhi	Penekanan transparansi terhadap pos terdepan penjagaan perbatasan sepanjang LAC. Pencegahan gangguan udara berupa pesawat tempur (radius – 10 km) dan penarikan pasukan militer
7	6-7 Juli 1994 di Beijing	Ratifikasi perjanjian Perdamaian dan Ketenangan tahun 1993. Klarifikasi atas perbedaan pandangan tentang aturan di sepanjang LAC yang menjadi penyebab kontak senjata antara <i>People's Liberation Army</i> (PLA) dan <i>Indian Army</i>

8	18-20 Agustus 1995 di New Delhi	Kedua negara sepakat untuk menarik kembali pasukan militer di empat pos terdepan sejauh 50-100 meter dari LAC
9	16-18 Oktober 1996 di Beijing	Peningkatan kunjungan antar jenderal militer dan pembangunan pos penjagaan bersama di sekitar LAC khususnya sektor timur
10	4-5 Agustus 1997 di New Delhi	Ratifikasi perjanjian tentang CBMs 1996. Klarifikasi LAC untuk menentukan definisi garis perbatasan secara bersama. Penekanan pada implementasi CBMs 1993 dan 1996 pada JWG.
11	26-27 April 1999 di Beijing	Revitalisasi hubungan bilateral kedua negara yang renggang akibat aktifitas uji coba nuklir India di kawasan perbatasan (Sektor Barat). Pelanggaran terhadap perjanjian Panchsheel dan perjanjian tentang Perdamaian & Ketenangan tahun 1993
12	28-29 April 2000 di New Delhi	Penerapan pendekatan “Forward Looking” dan membentuk kelompok ahli dalam sengketa perbatasan. Lanjutan pembahasan klarifikasi LAC dan implementasi CBMs dalam JWG
13	31 Juli – 1 Agustus 2000 di New Delhi	Penerapan pendekatan Konstruktif dan penekanan pendekatan “Forward Looking” dalam usaha penyelesaian sengketa perbatasan. Bertukar pandangan tentang masalah yang terjadi di regional dan internasional
14	21-22 November 2002 di New Delhi	Penekanan kembali pendekatan “Forward Looking” dan tukar pendapat tentang peta wilayah di sektor barat
15	30-31 Maret 2005	Pembahasan dan evaluasi menyeluruh tahapan JWG 1-14. Evaluasi hubungan bilateral politik, keamanan maupun ekonomi selama proses negosiasi. Klarifikasi LAC dan Implementasi CBMs dalam proses JWG

2.2.5 Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control

Kesepakatan terjalin pasca kunjungan kenegaraan Tiongkok yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Peng ke India. Kunjungan ini menjadi momentum setelah 31 tahun hubungan bilateral kedua negara renggang sejak tahun 1960. India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narasimha Rao membawa kebijakan baru yang diusulkan ke Tiongkok mengenai definisi garis perbatasan. Rao merubah resolusi sengketa perbatasan dengan menambah garis militer dan kembali ke pendekatan sektoral bukan secara keseluruhan. Namun Tiongkok menolak usulan tersebut dan tetap menerapkan pendekatan secara keseluruhan atau *Line of Actual Control* (LAC) (Sawhney & Wahab, 2017, pp. 2-10).

Pada September 1993 Rao dan Li Peng juga menandatangani *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control (LAC) China-India. Confidence Building Measures* (CBMs) menjadi dasar dari dibentuknya perjanjian ini sebagai langkah untuk mengurangi ketidakpercayaan selama proses negosiasi. Selain itu juga dilakukan sumpah bersama menentang penggunaan kekuatan militer di kawasan, penyelesaian konflik dengan konsultasi dan kooperatif serta pengurangan jumlah militer di kawasan Tibet oleh kedua negara. Tiongkok dan India juga sepakat untuk tetap mempertahankan militer di sepanjang LAC dengan prinsip kemanan timbal balik dan setara (Tripathi, 2012, pp. 1-5).

2.2.6 Agreement on Confidence Building Measures in Military Fields along the LAC in the India-China Border Area

Pada November 1996 diadakan perjanjian yang menjadi penekanan dari perjanjian tahun 1993 tentang *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility* di kawasan perbatasan namun lebih fokus ke bidang militer. Terdapat tiga poin utama yang dibahas untuk implementasi

CBMs. Pertama, membentuk *Military and Diplomatic Experts Group* dalam *Joint Working Group* (JWG) sebagai langkah awal CBMs. Kedua, menginisiasi pertemuan wajib yang diadakan 2 kali dalam setahun (Juni dan Oktober) di setiap sektor. Sektor Timur di Bum La dan Dichu, Sektor Tengah di Lipulekh dekat Pithograph dan Sektor Barat di Spanggur Gap. Ketiga, *Joint Working Group* menjadi fasilitas untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan kesalahpahaman, perbedaan persepsi bahkan perselisihan selama proses negosiasi (Sidhu & Yuan, 1999, p. 16).

Perjanjian 1993 dan 1996 membawa dampak positif kepada perkembangan CBMs dengan beberapa hasil signifikan di garis perbatasan. Pada tahun 1993 kedua negara sepakat untuk memastikan transparansi pada setiap kegiatan militer di garis perbatasan termasuk pencegahan gangguan udara dan pemindahan pasukan secara ilegal. Kemudian pada Agustus 1995 dibentuk perjanjian untuk menarik kembali pasukan militer dari pos terdepan sejauh 50-100 meter dari garis perbatasan. Pada Oktober 1996 dilakukan kesepakatan untuk meningkatkan kunjungan timbal balik oleh petinggi militer berpangkat jenderal besar dan pembangunan pos pengawalan di sepanjang garis perbatasan yang disengketakan. Pertemuan pada Agustus 1997 diadakan sebagai konsekuensi kedua belah pihak atas kesepakatan yang telah dibuat. Pertemuan sebagai instrument untuk meratifikasi hasil dari pertukaran perwakilan kedua negara dalam implementasi CBMs dalam *Joint Working Group* (Sidhu & Yuan, 2001, pp. 354-356).

2.2.7 Pertemuan China dan India pasca Perjanjian 1993 dan 1996

Hubungan bilateral antara kedua negara tidak mengalami kenaikan bahkan beberapa sektor mengalami penurunan pasca perjanjian 1993 dan 1996. Pertemuan ini juga menjadi penekanan terhadap keputusan Tiongkok dan India membuka kembali jalur Ladakh, Kailash dan Mansarover yang ditutup pasca konflik. Selain itu membahas tentang tindak lanjut Dalai Lama atas pemisahannya dari tanah India sebagai konsekuensi penandatanganan lima prinsip dasar Perjanjian

Panchsheel. Pada 14 Mei 1998, Tiongkok mengecam keras tindakan uji coba nuklir India yang dilakukan di sektor barat wilayah perbatasan. India melakukan penelitian dan aksi uji coba nuklir bersama dengan Pakistan. Tiongkok memaksa India-Pakistan untuk menandatangani Perjanjian Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (Sidhu & Yuan, 2001, p. 356). NPT merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai (UNODA, 1995).

2.2.8 Agreement on Adopting the "Forward Looking" Approach and forming an Expert Group at the JWG to Resolve Border Disputes and Clarification of LACs and Inter-Military CBMs

Joint Working Group (JWG) dibentuk guna memberikan wadah bagi militer kedua negara untuk berinteraksi dan menghasilkan solusi penyelesaian sengketa perbatasan. JWG mempunyai peran dalam pembentukan perjanjian CBM tahun 1993 dan 1996 (Sidhu & Yuan, 2003, pp. 122-3). Pendekatan *forward looking* digunakan pada JWG ke 13 tahun 2000 agar diskusi tidak terpacu dengan masalah yang lalu dan efektif untuk membahas masa depan. Perubahan arah diplomasi dari *representative meetings* ke arah yang lebih tinggi dan kompleks yakni *high level meetings*. India mengusulkan untuk mengadakan *Border Personal Meeting* (BPM) untuk meningkatkan pertukaran informasi dan transparansi bidang militer sebagai langkah dari implementasi CBMs. Usulan tersebut diajukan pada Dialog Bidang Pertahanan Tahunan tahun 2011 (Chansoria, India and China: Assessing the Need to Strengthen Bilateral Confidence Building Measures, 2012, pp. 18-19).

Tiongkok dan India mengulas CBMs untuk dibawa ke JWG sebagai bahan evaluasi. Sebagai salah satu pencapaian dalam proses normalisasi hubungan diplomatik Tiongkok-India

maka CBMs mempunyai tiga prinsip utama yakni *declarative principles*, *informative exchange principles* dan *constraining confidence building measures principles* (Das R. N., 2013, pp. 46-47).

Secara rinci *declarative principles* terbagi menjadi empat poin utama. Tiongkok maupun India tidak boleh ada ancaman menggunakan kekuatan satu sama lain. Kedua belah pihak harus hormat dan mematuhi *Line of Actual Control* (LAC). Penyelesaian mengenai sengketa perbatasan harus secara adil, wajar dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Serta harus meminimalisir pasukan militer kedua negara di kawasan perbatasan.

Sementara *informative exchange principles* terbagi menjadi tiga poin. Tiongkok ataupun India harus menyiapkan ahli militer diplomatik untuk mengadakan pertemuan reguler. Menetapkan jalur batas dan meningkatkan pertemuan antara komandan pasukan perbatasan. Serta pertukaran informasi tentang bencana alam dan penyakit di sepanjang perbatasan.

Selanjutnya *constraining confidence building measures* terbagi menjadi empat poin. Tiongkok dan India harus membatasi jumlah pasukan militer dalam zona yang sudah disepakati dalam LAC termasuk jumlah tank tempur dan kendaraan tempur infantri dengan senjata 75mm atau lebih besar, mortar dengan caliber setidaknya 120mm serta rudal ke permukaan udara (masih tahap negosiasi). Menghindari latihan militer skala besar yang melibatkan satu divisi (15.000 pasukan) dan memberi pihak lain jika melakukan latihan dengan satu brigade (5.000 pasukan). Melarang penerbangan pesawat tempur dalam jarak 10 km dari LAC, namun pesawat tanpa senjata dan helikopter diperbolehkan dan dilarang menembaki atau memburu dalam radius 2 km dari LAC.

2.2.9 Agreement and Declaration of the Principles of Comprehensive Relations and Cooperation between India and China.

Pasca momentum serangan teroris 11 September di Amerika, India dan Tiongkok komitmen untuk membangun hubungan yang lebih intens. Gelombang terorisme juga terjadi di India yang dilakukan oleh kelompok militan India dan kelompok sparatis berbasis agama. Pemberontakan oleh kelompok sparatis ini terjadi di wilayah timur hingga selatan perbatasan dengan Pakistan. Pada Januari 2002, Perdana Menteri China Zhu Rongji's mengunjungi India dengan interaksi politik yang signifikan. Kerjasama *counter terrorism* dengan pertukaran badan intelengensi dan bantuan pasukan militer di wilayah Selatan dan Jammu-Kashmir (Keshav, 2004, p. 207). Selain melakukan kerjasama bidang keamanan, kunjungan Zhu Rongji's juga menghasilkan enam perjanjian dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Pada tahun 2003 menteri Pertahanan India George Fernandes mengunjungi Tiongkok dengan pembahasan tentang krisis penyakit SARS, pertukaran militer, dialog *counter terrorism*, dan peningkatan CBMs sepanjang LAC (Pokharna, 2009, pp. 97-98).

Pada Juni 2003, Perdana Menteri A.B Vajpayee mengunjungi Tiongkok guna penandatanganan sepuluh perjanjian dan deklarasi *Agreement and Declaration of the Principles of Comprehensive Relations and Cooperation between India and China*. Kedua negara menginisiasi sebuah langkah baru negosiasi dengan tema *Special Representative Meeting* (SRM) dan pembentukan kelompok ahli *Joint Study Group* (JSG). Selain itu dalam kasus Tibet, India mengakui bahwa wilayah otonomi Tibet termasuk dalam kedaulatan Tiongkok dan sekaligus melarang gerakan anti Tiongkok oleh orang Tibet di India. Sebaliknya Tiongkok juga mengakui wilayah Sikkim sebagai kedaulatan dari India (Pokharna, 2009, pp. 99-100).

Periode 2005-2017

Pertemuan Special Representative Meeting (SRM) diadakan 19 putaran hingga tahun 2016 (pra Docklam Standoff 2017) (Kondapalli, 2007, pp. 415-417)

Tabel 2.2 *Special Representative Meeting (SRM)*

No	Special Representative Meeting (SRM)	Pembahasan
1	23-24 Oktober 2003 di New Delhi	Brajesh Mira (India) dan Dai Bingguo (Tiongkok) dengan tema pembahasan “ramah, konstruktif dan kooperatif”
2	12-13 Januari 2004 di Beijing	Implementasi dan optimalisasi CBMs ke LAC, pertukaran militer serta kerjasama bidang keamanan & ekonomi
3	26-27 Juli 2004 di New Delhi	J.N Dixit (India) menggantikan Brajesh Mira dalam SRM. Pembahasan masih fokus pada implementasi CBMs, pertukaran militer dan kerjasama ekonomi, keamanan & ekonomi
4	18-19 November 2004 di Beijing	Perwakilan kedua negara melakukan evaluasi terhadap pertemuan SRM ketiga karena kurangnya optimalisasi implementasi CBMs
5	10-12 Maret 2005	Pembentukan <i>China-India Regional Trading Arrangement</i>
6	26-27 September 2005 di Beijing	Diadakan 10 hari setelah pertemuan PM India dan President Tiongkok di Sidang Umum PBB. Membentuk <i>Sino-Indian Strategic Cooperative Partnership Oriented to Peace and Prosperity in 2005</i> . Mendeklarasikan tahun 2006 sebagai <i>Sino-Indian friendship Year</i>
7	11-13 Maret 2006 di New Delhi dan Kumarkom	Pertemuan mengambil konsep pendekatan “HouseBoat Diplomacy”. Kedua perwakilan memutuskan pembentukan <i>basic framework</i> untuk pertemuan agar membuahkan hasil.
8	25-26 Juni 2006 di Beijing	Penggabungan <i>basic framework</i> yang diusulkan oleh kedua negara untuk menjadi pedoman pada pertemuan selanjutnya. Pembukaan kembali wilayah dagang perbatasan Nathu La Pass
9	16-18 Juni 2007 di Beijing	Pembahasan masih berlanjut pada penentuan <i>basic framework</i> dengan berdasar pada perjanjian 2005 tentang Parameter Politik dan Prinsip-Prinsip Panduan. Tiongkok lebih

		condong ke perdagangan namun India lebih fokus ke masalah sengketa perbatasan
10	20-22 April 2007 di New Delhi	Masih dalam ranah penepatan <i>basic framework</i> dengan lebih mengacu pada Parameter Politik dan Prinsip-Prinsip Panduan
11	26-27 September 2007 di Beijing	Perbedaan usulan pendekatan penyelesaian sengketa perbatasan, Tiongkok menuntut <i>mutual understanding and mutual accommodation</i> , India mengusulkan <i>fair, reasonable and mutually acceptable</i> .
12	18-19 September 2008 di Beijing	Pembahasan masih terpaku pada penetapan <i>basic framework</i>
13	8-9 Agustus 2009 di New Delhi	Kesepakatan tentang penentuan <i>basic framework</i> berdasar Parameter Politik dan Prinsip-Prinsip Panduan dengan pendekatan <i>fair and reasonable solution acceptable</i> . Penekanan kembali <i>China India Strategic Cooperative Partnership</i> . Menetapkan isu ekonomi menjadi pembahasan utama kedua setelah masalah perbatasan.
14	29-30 November 2010 di Beijing	Kesepakatan tentang perluasan pembahasan tidak hanya perbatasan dan ekonomi namun budaya, infrastruktur dll.
15	15-17 Januari 2012 di New Delhi	Penandatanganan <i>Agreement on the establishment of a Working Mechanism on Consultation and Coordination on India-China Border Affairs</i> .
16	28-29 Juni 2013 di Beijing	Tukar pendapat tentang implementasi consensus yang telah sukses dilaksanakan oleh kedua pemimpin negara. Penyelenggaraan <i>working mechanism for consultation and coordination on China-India Border Affairs</i> . Penanganan konflik jarak dekat antar militer di South Tian Wendian Valley.
17	10-11 Februari 2014 di New Delhi	Evaluasi terhadap kunjungan pimpinan kedua negara pada tahun 2013 yang menghasilkan beberapa perjanjian. Melanjutkan pembahasan mengenai <i>basic framework</i> untuk penyelesaian sengketa perbatasan.
18	23 Maret 2015 di New Delhi	Menekankan pentingnya pertemuan antar pemimpin negara. Konsultasi masalah <i>counter</i>

		<i>terrorism</i> , maritim, perubahan iklim dan kerjasama pengembangan nuklir.
19	20 April 2016 di Beijing	Membahas tentang posisi Tiongkok sebagai anggota dewan keamanan tetap PBB untuk teguh dalam pendirian tentang “Ancaman terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional yang disebabkan oleh Aksi Teroris”

2.2.10 Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question

Pasca kunjungan Perdana Menteri Vajpayee ke Beijing pada tahun 2003, perkembangan proses penyelesaian sengketa perbatasan meningkat signifikan. SRM empat kali diadakan dalam jangka dua tahun dengan satu penandatanganan perjanjian prinsip-prinsip hubungan dan kerjasama komprehensif. Pada 30-31 Maret 2005 di Beijing diadakan ronde terakhir JWG dengan pembahasan evaluasi seluruh proses JWG 1-14. Fokus pembahasan utama JWG masih dalam klarifikasi LAC dan implementasi CBMs (India M. C., 2014).

Pada tanggal 11 April 2005, Tiongkok dan India menandatangani perjanjian Parameter Politik dan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Penyelesaian Sengketa Batas China-India. Seperti yang tertulis di pasal 2 bahwa perjanjian ini tetap berdasar pada lima prinsip dasar Panchsheel 1954 dan sebagai momentum perubahan arah diplomasi yang lebih representative bagi kedua belah pihak. Selain itu penandatanganan ini menjadi penekanan dari perjanjian sebelumnya yakni Perjanjian 1993, 1996 dan 2003 sesuai yang tertulis pada pasal IX (India M. G., 2005).

2.2.11 Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of India and the Ministry of National Defence of the People's Republic of China for Exchanges and Cooperation in the Field of Defence 2006

MoU ini dilakukan berdasar pada *Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation between India and China* tahun 2003 dan *Joint Statement* tahun 2005 serta prinsip PBB tentang pengembangan kerjasama strategi dan kooperatif. Selain itu hal ini sebagai wujud implementasi CBMs tahun 1993 dan 1996 termasuk untuk angkatan bersenjata agar terbentuk rasa saling percaya di sepanjang garis perbatasan. Secara keseluruhan fokus pada bidang militer dengan beberapa perumusan dan pengusulan kerjasama. Tertulis di pasal 1 bahwa perlu ada pertemuan pejabat tinggi militer kedua negara yang intens serta dialog pertahanan tahunan. Hal ini guna mengevaluasi proses pertukaran militer baik akademi maupun profesional dan latihan gabungan *search & rescue*, anti pembajakan dan *counter terrorism* (India M. C., 2006).

2.2.12 Point Strategy in A Joint Declaration on Further Developing the Strategic and Cooperative Partnership between China and India

1. Ensuring comprehensive development of bilateral relations
2. Strengthening institutional linkages and dialogue mechanisms
3. Consolidating commercial and economic exchanges
4. Expanding all-round mutually beneficial cooperation
5. Instilling mutual trust and confidence through defence cooperation
6. Seeking early settlement of outstanding issues
7. Promoting trans-border connectivity and cooperation
8. Boosting cooperation in science and technology
9. Revitalizing cultural ties and nurturing people-to-people exchanges
10. Expanding cooperation on regional and international stages (China, 2006)

2.2.13 The Shared Vision of India and China for the 21st Century 2008

Momentum ini terjadi ketika kunjungan Perdana Menteri India Manmohan Singh atas undangan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao pada Januari 2008. Pertemuan ini menjadi batu loncatan kedua negara untuk merumuskan kesepakatan jangka panjang pedoman penyelesaian

sengketa perbatasan. *A Shared Vision for the 21st Century* merupakan hasil dari pengembangan *Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity* (Scott, 2008, pp. 244-5).

Perjanjian ini dibentuk dengan 18 kesepakatan dalam berbagai bidang mulai dari ekonomi, politik dan keamanan. Lima prinsip dasar Panchsheel tetap menjadi pedoman dalam setiap proses negosiasi penyelesaian sengketa perbatasan. Tiongkok dan India sebagai negara besar dan tempat tinggal sepertiga umat di bumi sadar bahwa hubungan bilateral antara keduanya mempunyai dampak yang signifikan bagi regional dan internasional. Oleh karena itu keduanya sepakat untuk mendorong hubungan multilateral di berbagai forum seperti East Asia Summit, Asia Europe Meeting, South Asian Association for Regional Cooperation. Selain itu juga penekanan pada penyelesaian masalah terorisme dan penggunaan nuklir (India M. o., 2008).

2.2.14 Joint Communiqué of the Republic of India and the People's Republic of China 2010

Kerjasama ini merupakan refleksi dari kesepakatan sebelumnya tentang CBMs 1993 dan 1996 dan Panchsheel 1954. Kedua negara membentuk mekanisme pertemuan regular antara kepala pemerintahan dan menteri luar negeri. Selain itu juga merumuskan telepon hotline antara Perdana Menteri India dan Perdana Menteri Tiongkok (India M. C., 2010). China dan India juga sepakat untuk menjadikan tahun 2011 sebagai *Year of India China Exchange*. Kedua negara mendorong momentum ini dengan pertukaran secara masif diberbagai bidang seperti organisasi masyarakat sipil, pemuda, media, beasiswa, *think-tanks* dan budaya (Pandit, Krishnamurty, Panda, & R.N.Das, 2011, p. 3).

2.2.15 Agreement on the Establishment of a Working Mechanism on Consultation and Coordination on India-China Border Affairs 2012

Kesepakatan ini dibentuk berdasarkan hasil dari *Special Representative Meetings* (SRM) ke 15 sebagai langkah aktif kedua negara untuk terus melakukan peningkatan kepercayaan selama

proses negosiasi berlangsung (Nn, 2016). *Working Mechanism on Consultation a Coordination on India-China Border Affairs* dibentuk pada 17 Januari 2012 dan akan dipimpin oleh *Joint Secretary level* dari Menteri Luar Negeri India dan *Director General level* dari Menteri Luar Negeri Tiongkok serta dari diplomat dan militer. Namun *working mechanism* ini tidak membahas tentang penyelesaian sengketa perbatasan atau mempengaruhi kinerja *Special Representatives Meeting Mechanism* (India M. C., 2012).

Perkembangan *Working Mechanism on Consultation a Coordination (WMCC) on India-China Border Affairs*: (Panda, 2014, p. 6)

Tabel 2.3 *WMCC on India-China Border Affairs*

No	Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs	Pembahasan
1	5-6 Maret 2012 di Beijing	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan mekanisme kerja. - Konsultasi darurat dilakukan melalui konferensi telepon dan video. - Penambahan rute untuk perdagangan di perbatasan. - Eksplorasi rute alternative Kailash Mansarovar Yatra
2	29-30 November 2012 di New Delhi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan tentang perkembangan di daerah perbatasan - Pembentukan langkah-langkah tambahan untuk menjaga perdamaian dan ketenangan - Pembukaan area pasar bebas di Nathu La - Rute tambahan untuk Kailash Manasarovar Yatra
3	23-24 Juli 2013 di New Delhi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fungsi <i>Working Mechanism</i> - Penambahan poin pada <i>Confidence Building Measures (CBMs)</i>
4	29-30 September 2013 di Beijing	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi perkembangan di kawasan perbatasan khususnya Sektor Barat
5	10 Februari 2014 di New Delhi	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi <i>Border Defence Cooperation Agreement (BDCA)</i>

		- Penambahan CBMs
6	28-30 April 2014 di Beijing	- Implementasi BDCA - Implementasi CBMs - Menetapkan rute alternative untuk Kailash Mansarovar Yatra
7	27 Agustus 2014 di Beijing	- Operasionalisasi BDCA
8	16-17 Oktober 2014 di New Delhi	- Pencapaian konsensus pada implementasi CBMs seperti interkasi reguler antara markas besar Angkatan Darat dan Komando Lapangan kedua negara.
9	30-31 Agustus 2016 di New Delhi	Evaluasi atas WMCC ke VIII dengan penekanan terhadap komunikasi jalur hotline oleh militer kedua negara di jalur perbatasan
10	17 November 2017 di Beijing	Evaluasi terhadap implementasi CBMs di semua sektor tidak hanya sektor barat saja.

2.2.16 A Vision for Future Development of China-India Strategic and Cooperative Partnership 2013

Kerjasama dibentuk dengan menerapkan konsep *Strategic and Cooperative Partnership fro Peace and Prosperity* yang berdasar pada lima prinsip dasar Panchsheel 1954 dan CBMs 1993 & 1996. Kedua negara sepakat untuk mendorong kinerja *Strategic Economic Dialogue* (SED) dan *Joint Economic Group* (JEG) sebagai modal untuk masuk ke *Regional Trade Agreement* (RTA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Dalam ranah sengketa perbatasan, kedua negara sepakat untuk membentuk *Border Defence Cooperation Agreement* (BDCA) sebagai refleksi perjanjian tahun 1993, 1996 dan 2005. Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU *Strengthening Cooperation on Transborder Rivers* yang diperantarai oleh *Expert Level Mechanism* (Office P. I., 2013).

2.2.17 Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on Border Defense Cooperation Agreement (BDCA)

Perjanjian ini ditandatangani pada 23 Oktober 2013 di Beijing oleh Perdana Menteri India Dr Manmohan Singh dan Premier China Li Keqiang. Tujuan utama dari perjanjian ini untuk memberikan definisi dari *Line of Actual Control* (LAC). BDCA merupakan salah satu langkah penting dalam peningkatan CBMs karena menyangkut langsung dengan kebijakan di area perbatasan (Das B. , 2014, pp. 35-36).

Perjanjian 1993, 1996 dan 2005 merupakan dasar dari implementasi CBMs untuk LAC menjadi pondasi atas terbentuknya perjanjian ini. Pada artikel II disebutkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan.

1. Exchange information-including information about military exercises, aircrafts, demolition operations and unmarked mines-and take consequent measures conducive to the maintenance of peace, stability and tranquility along the line of actual control in the India-China border areas,
2. Jointly combat smuggling of arms, wildlife, wildlife articles and other contrabands,
3. Assist the other side in locating personnel, livestock, means of transport and aerial vehicles that may have crossed or are possibly in the process of crossing the line of actual control in the India-China border areas,
4. Work with the other side in combating natural disasters or infectious diseases that may affect or spread to the other side,
5. Any other way mutually agreed upon by the two sides (Office P. I., 2013).

Pada pasal III dijelaskan tentang pertemuan berkala di sepanjang garis perbatasan yang dilaksanakan oleh militer India dan Tiongkok. Selain itu juga pertemuan secara periodikal oleh menteri pertahanan kedua negara. Sebagai pendorong implementasi dari perjanjian ini maka dibentuk *Border Personnel Meeting* (BPM) di semua sektor (barat, tengah, timur) (Office P. I., 2013).

2.2.18 China-India Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity 2014

Bidang ekonomi menjadi isu pembahasan utama diluar isu perbatasan, social, budaya dan politik. Evaluasi *Joint Economic Group* hingga penandatanganan perjanjian *Five Year Development Program for Economic and trade Cooperation*. Selain itu juga penekanan terhadap

kerangka kerja BCIM (Bangladesh, China, India, Myanmar) *Economic Corridor*. India juga membuka investasi bidang infrastruktur dan industri hingga 20 miliar dollar amerika. Sebagai implementasi dari investasi Tiongkok ke India maka disepakati dan dilakukan penandatanganan MoU *Plan on Cooperation in Railways*. Menjaga komitmen dalam pengembangan kerjasama maka ditetapkan 2015 sebagai *Visit India Year* dan 2016 sebagai *Visit China Year*. Selain itu penetapan Nathu La Pass tidak hanya sebagai jalur perdagangan namun jalur alternative peziarah agama Kailash Manasarovar Yatra ke wilayah Tibet (India M. C., 2014).